

PENULISAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA TERBITNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Alexandra Lydia Diella Permatasari

NPM : 180512999

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA TERBITNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Alexandra Lydia Diella Permatasari

NPM : 180512999

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA TERBITNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP
PENYELENGARAAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

Alexandra Lydia Diella Permatasari

NPM : 180512999

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

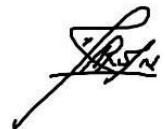
Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 20 Januari 2022

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA TERBITNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Febuari 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Yang menyatakan,



A. Lydia Diella P.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya yang tiada henti diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar yang judul “Kebijakan Perizinan Berusaha Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 di Kota Yogyakarta.”

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuannya sehingga skripsi dapat selesai dengan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunianya penulisan skripsi yang dilakukan penulis dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan berarti.
2. Orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan baik semangat maupun doa.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan terhadap penulisan skripsi serta membimbing dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
5. Sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk

menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Penulis



A. Lydia Diella P.



Abstrak

Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengendalikan eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan karena kegiatan sosial maupun ekonomi. Izin sebagai alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Perizinan membutuhkan objektivitas yang jelas serta tertulis pada kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya zaman. Diadakan sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan izin diharapkan dapat memberi kemudahan untuk masyarakat pelaku usaha supaya antusias saat mengurus izin usaha. Didasarkan pada hal tersebut pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *online single submission*. Sistem *online single submission* memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan baik terhadap pelaku usaha maupun perangkat daerah, khususnya dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif dengan melakukan wawancara beberapa narasumber dan analisis data. Hasil dari olah data ditemukan bahwa ada perubahan terhadap struktur tatanan organisasi, pemisahan pengurusan perizinan serta kendala yang masih dirasakan oleh para pihak. Penulis merekomendasikan untuk pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan penyesuaian sistem dan prosedur karena terbitnya peraturan daerah yang baru saja dikeluarkan pada akhir Desember 2021.

Kata kunci: Perizinan Berusaha, *Online Single Submission*, Kebijakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Abstract

Licensing is a government policy tool at both the central and regional levels to control negative externalities that can be caused by social and economic activities. Permit as a tool for legal protection of ownership or operation of activities. Licensing requires clear objectivity and is written in government policies as a reference. Licensing changes with the times. With the establishment of an electronic licensing system to facilitate permit processing, it is hoped that it will make it easier for the business community to be enthusiastic when taking care of business permits. Based on this, the government issued an electronic-based licensing registration system called online single submission. The online single submission system requires adaptation in its implementation both for business actors and regional officials, especially in this case the Yogyakarta City One Stop Integrated Service and Investment Service. The research was conducted using a normative method by conducting interviews with several sources and analyzing data. The results of data processing found that there were changes to the organizational structure, the separation of licensing arrangements and obstacles that were still felt by the parties. The author recommends that the Yogyakarta City government immediately make system and procedure adjustments due to the issuance of a new regional regulation that was just issued at the end of December 2021.

Keywords: Business Licensing, Online Single Submission, Policies, Investment Service and One Stop Services at Yogyakarta City.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Penulisan Hukum	iii
Halaman Pengesahan Penulisan Hukum	iv
Surat Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	14
B. Kebijakan Perizinan Berusaha Setelah Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terhadap Penyelenggaraan Perizinan di Kota Yogyakarta	25
BAB III PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51